

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam

Baru Harahap^{a,*}, Muhammad Rahmat^b

^{ab}Universitas Ibnu Sina, Kota Batam

*baru.harahap@uis.ac.id, muhammad.rahmat@uis.ac.id

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of billboard tax and its contribution to regional revenue (PAD), especially in the context of regional autonomy, which requires local governments to continuously increase their revenue. One of the efforts to achieve this is by optimizing the collection of local taxes, including billboard taxes. Billboard taxes in Batam City provide a significant contribution to local revenue, although in practice, it has not yet reached its full potential. Additionally, tax targets are often set based on past performance rather than actual potential. This study was conducted from April to July 2019, with the research object being the Regional Revenue Office (Dispenda) of Batam City. The sampling technique used was non-probability sampling, specifically purposive sampling, utilizing financial reports from 2019 to 2023. Data analysis was carried out using multiple regression to test the hypothesis. The results of the analysis showed that, simultaneously, the effectiveness of billboard taxes and their contribution significantly affect regional revenue. Partially, the effectiveness of billboard taxes has a significant relationship with PAD, while the contribution of billboard taxes also significantly influences PAD in Dispenda Batam City.

Keywords: Regional Income, Effectiveness of Parking Taxes, Contribution of Parking Taxes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pajak reklame serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), terutama dalam konteks otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pajak reklame. Pajak reklame di Kota Batam memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap penerimaan daerah, meskipun dalam implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, penetapan target pajak sering kali hanya berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan selama periode April hingga Juli 2019 dengan objek penelitian Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling, yakni purposive sampling, yang memanfaatkan laporan keuangan dari tahun 2019 hingga 2023. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan, efektivitas pajak reklame dan kontribusinya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial, efektivitas pajak reklame memiliki hubungan yang signifikan terhadap PAD, sementara kontribusi pajak reklame juga memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Dispenda Kota Batam.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas Pajak Reklame, Kontribusi Pajak Reklame.

1. Pendahuluan

Pembangunan di tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan suatu negara. Kesuksesan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan setiap daerah dalam memanfaatkan potensi lokalnya. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan serta sistem yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di daerah masing-masing. Hal ini juga meliputi

pengelolaan yang efektif terhadap pendapatan daerah, baik yang sudah ada maupun yang belum sepenuhnya tergali, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah di Indonesia yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam

pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan setempat. Pemungutan pajak di setiap daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk menetapkan pajak daerah.

Efektivitas pajak reklame mencerminkan sejauh mana Dinas Pendapatan Daerah berhasil mengumpulkan pajak dalam satu tahun anggaran. Hal ini dapat diukur dari persentase penerimaan pajak reklame yang terkumpul dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kontribusi pajak reklame menggambarkan sejauh mana pajak tersebut berperan dalam pendapatan asli daerah (PAD), yang dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak reklame dengan total PAD dalam satu tahun anggaran.

Dalam pembangunan daerah, pengelolaan potensi lokal menjadi elemen kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Pencapaian dalam pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar mampu mengelola serta mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan daerah. Hal ini termasuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak, khususnya pajak reklame, memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Pajak reklame diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajak ini. Penilaian terhadap efektivitas pajak reklame dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran yang berjalan.

Selain itu, kontribusi pajak reklame terhadap PAD menunjukkan seberapa besar peran pajak tersebut dalam keseluruhan pendapatan daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak reklame dengan total PAD. Oleh karena itu, pajak reklame memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap PAD sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya. Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan pajak reklame serta peningkatan kinerja sumber daya manusia akan mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Pajak reklame memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pendapatan asli daerah. Efektivitas pengumpulan pajak reklame menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana daerah berhasil dalam mengelola sumber pendapatan tersebut. Sementara itu, kontribusi pajak reklame dapat dilihat dari perbandingan antara penerimaan pajak tersebut dengan total PAD yang didapatkan dalam satu tahun anggaran.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan pajak reklame yang optimal dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pajak reklame berpotensi besar untuk mendukung tujuan pembangunan, sehingga pengelolaan yang efektif sangat dibutuhkan agar kontribusi pajak ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah dan bangsa secara keseluruhan.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2018 – 2023 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan
2018	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 4.132.543.434,00
2019	Rp. 5.300.000.000,00	Rp. 5.545.653.766,92
2020	Rp. 6.800.000.000,00	Rp. 6.567.456.154,00
2021	Rp. 7.452.000.000,00	Rp. 7.764.453.564,00
2023	Rp. 8.100.000.000,00	Rp. 8.432.546.123,00

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Reklame Kota Batam Tahun 2019 – 2023

Tabel 2 Data Realisasi Penerimaan PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD
2018	Rp. 425.551.392.753,00
2019	Rp. 513.578.934.109,01
2020	Rp. 606.240.450.986,13
2021	Rp. 729.744.837.450,23
2023	Rp. 850.845.164.853,42

Dari tabel yang ditampilkan, terlihat bahwa setiap tahunnya Dinas Pendapatan Kota Batam terus meningkatkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki potensi sumber daya yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pada kenyataannya masih ada tahun-tahun tertentu, seperti 2018 dan 2019, di mana realisasi penerimaan pajak tidak sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun-tahun berikutnya, seperti 2019, 2020, dan 2023, realisasi pajak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah, harus terus berupaya untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak guna meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung pada mekanisme pemungutan yang diterapkan.

Dari data tersebut, kita dapat mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD. Jika penerimaan pajak reklame tidak dikelola secara efektif, maka kontribusinya terhadap PAD juga tidak akan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Batam Periode Tahun 2018-2023)".

2. Kajian Literatur

Efektifitas Pajak Reklame

(Menurut Mahmudi (2019: 143), efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu proses dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Semakin besar output yang

dihasilkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka semakin efektif proses kerja dalam suatu organisasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian tersebut, efektivitas dapat disimpulkan sebagai ukuran yang menggambarkan sejauh mana manajemen berhasil mencapai target yang telah ditentukan (baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu). Untuk mengukur tingkat efektivitas dengan lebih rinci, digunakan kriteria yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, yang dirinci dalam tabel berikut ini: (tabel belum disertakan).

Tabel ini memberikan standar evaluasi yang lebih konkret dalam mengukur efektivitas pencapaian target keuangan dan program-program pemerintah daerah.

Tabel 3 Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Kontribusi Pajak Reklame

Menurut Mahmudi (2019: 145), kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi tersebut, dilakukan perbandingan antara penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode yang sama. Jika hasil perbandingannya besar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang signifikan terhadap PAD. Sebaliknya, jika hasilnya kecil, maka kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah, diperlukan asumsi dan metode yang jelas, seperti perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan total PAD. Asumsi-asumsi ini akan memberikan gambaran mengenai peranan pajak daerah dalam mendukung keuangan daerah dan pembangunan setempat.

Tabel 4 Rasio Kontribusi

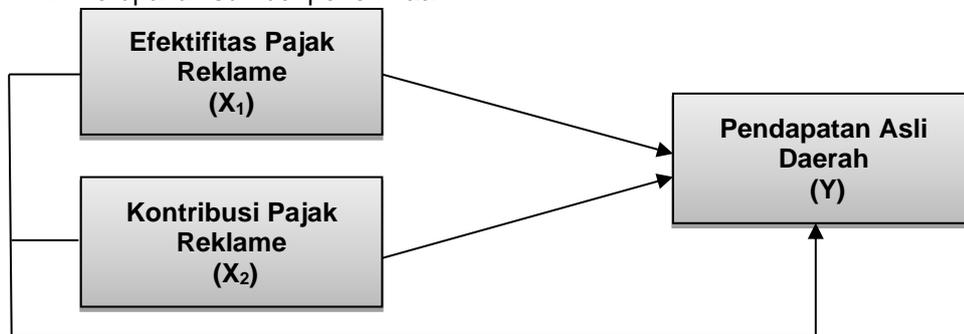
Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Tidak Berkontribusi
10,10% - 20%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40%	Berkontribusi
40,10% - 50%	Sangat Berkontribusi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen seperti tabel diatas.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Darise (2019: 37), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1: Efektifitas pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam

Hipotesis 2: Kontribusi pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam

Hipotesis 3: Efektifitas dan kontribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam..

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

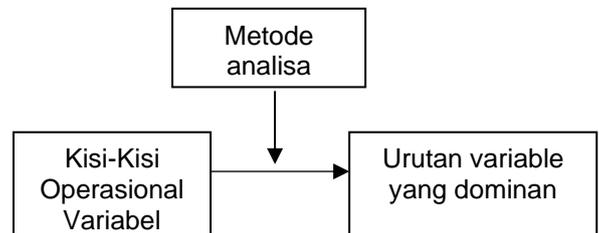
Desain penelitian merupakan suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan

daerah yang harus terus ditingkatkan untuk menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat. Dengan peningkatan PAD, diharapkan kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat tercapai.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari potensi wilayah setempat. Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan gambaran sementara tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi fokus penelitian adalah "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam".

dilakukan periset mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis terakhir (Umar, 2019: 5)



Gambar 2. Tahapan Penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan ringkasan dari informasi yang diperoleh dari data dan disajikan dari bentuk uji t dan uji f.

1 Hasil Uji t

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	764.242	754.641		7.878	.000
Efektifitas Pajak Reklame	.865	.187	.832	7.545	.004
Kontribusi Pajak Reklame	.798	.175	.776	6.785	.002

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Ada pun bentuk persamaan dari hasil perhitungan diatas adalah :

$$Y = 764.242 + 0.865X_1 + 0.798X_2 + e$$

1). Konstan = 764.242

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif, variabel X (X_1 dan X_2), bila variabel X (Efektifitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame naik satu satuan, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 764.242.

2).Efektifitas Pajak Reklame (X_1) = 0.865

Merupakan nilai koefisien regresi variabel Efektifitas Pajak Reklame (X_1) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) artinya jika Efektifitas Pajak Reklame naik satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.865. Koefisien bernilai positif artinya antara

Efektifitas Pajak Reklame (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki hubungan positif. Peningkatan nilai variable X_1 akan mengakibatkan penurunan pada variable Pendapatan Asli Daerah (Y).

3).Kontribusi Pajak Reklame (X_2) = 0.798

Merupakan nilai koefisien regresi variabel independen Kontribusi Pajak Reklame (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) artinya jika Kontribusi Pajak Reklame (X_2) mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.798. Koefisien bernilai positif artinya antara Kontribusi Pajak Reklame (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki hubungan positif. Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame (X_2) akan mengakibatkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (Y)

Tabel 4 Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	764.242	754.641		7.878	.000
Efektifitas Pajak Reklame	.865	.187	.832	7.545	.004
Kontribusi Pajak Reklame	.798	.175	.776	6.785	.002

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat nilai Efektifitas Pajak Reklame yang mempunyai nilai signifikan $0.004 < 0,05$. Artinya Efektifitas Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya.

Hasil perhitungan dari Kontribusi Pajak Reklame mempunyai nilai signifikan $0.002 <$

$0,05$. Artinya Kontribusi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. Sehingga semakin tinggi Kontribusi Pajak Reklame maka akan semakin rendah Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan perusahaan karena timbulnya biaya bunga.

Tabel 5 Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6754767657	2	1779876785	86.756	.000 ^b
Residual	88654657	67	76776567		
Total	6787567000	69			

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Reklame, Efektifitas Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel Uji F diatas diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan secara simultan Kontribusi Pajak Reklame dan Efektifitas Pajak Reklame, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Analisis tingkat efektifitas dan besar kontribusi pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Efektifitas pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
- Kontribusi pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
- Efektifitas pajak Reklame dan kontribusi pajak Reklame secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

Saran

Adapun rekomendasi yang dapat disarankan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah:

- Untuk menindak lanjuti masalah pelanggaran pajak, perlu adanya peraturan yang memuat tentang sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.
- Perlu perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat potensi pajak Reklame senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
- Dilakukan proses pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah ada, melalui kegiatan pemantauan dan

pengendalian atas seluruh proses pemungutan secara berkala.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2019). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset*, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. (2019). *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Cetakan Enam, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Duwi. (2019). *Mandiri Belajar SPSS - Bagi Mahasiswa dan Umum*, Yogyakarta: Mediakom.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Salomo, Roy V dan M. Ikhsan. (2012). *Keuangan Daerah di Indonesia*. STIA LAN Press Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2019). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Umar, Husein. (2019). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis serta Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Raja
- Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Wibowo, Agung Edy. (2012). *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.